BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, makhluk yang memiliki akal dan *nurani*. Manusia dengan akal yang dimilikinya terus berpikir, memahami berbagai fenomena yang terjadi, serta dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya pula manusia menciptakan perubahan. Manusia adalah makhluk dinamis, yaitu makhluk yang selalu berkembang, membuat dan menciptakan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap individu manusia tidak akan berhenti berkembang, karena pada hakikatnya manusia mengalami perubahan baik cepat maupun lambat. Perubahan yang terjadi pada individu manusia, tentunya akan diikuti dengan perubahan pada kehidupan bermasyarakat dan pada akhirnya akan merubah sistem kehidupan secara universal.

Globalisasi merupakan hubungan sistemik dari semua hubungan-hubungan sosial. Kehidupan dan penghayatan manusia telah menyatu karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informasi. Dunia seakan menciut, sekat-sekat pembatas ruang dan waktu semakin hilang. Budaya-budaya asing semakin gencar, bebas masuk dalam tatanan kehidupan berbangsa. Berbagai pengaruh baik positif maupun negatif dari budaya asing yang masuk, menyebar ke berbagai pelosok negeri termasuk Kota Tasikmalaya yang terkenal dengan sebutan Kota Santri itu kini tidak jauh berbeda dengan Kota Metropolitan yang penuh dengan *hingar-bingar*.

Anak-anak muda penerus bangsa tidak berdaya menghadapi berbagai macam perubahan dan perkembangan teknologi yang semakin cepat, hal tersebut lambat laun akan mengikis tatanan kebudayaan dan kehidupan bangsa. Dalam media massa *online e-pendidikan.com* [13 Februari 2013], ada sebuah berita yang menarik, yang harus menjadi perhatian dunia pendidikan:

Rini Sofiani, 2013
Kontribusi Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Mutu Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Tasikmalaya
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

> "...Para siswa SD hingga SMA sederajat...ditengarai sudah kecanduan permainan di internet (*game online*) sehingga cenderung malas belajar. Di sejumlah warung internet...diketahui, puluhan kelompok pelajar hampir setiap hari memenuhi warnet untuk bermain *game online*, bahkan ada siswa yang membolos sekolah demi menyalurkan hobi di dunia maya tersebut. Seorang pelajar di salah satu SD Negeri, mengaku sengaja menyisihkan uang jajannya sebesar Rp 3.000 per hari untuk bermain *game online* di warnet selama satu jam penuh karena sehari saja tidak ke warnet ia mengaku pusing...". (kompas.com)
>
> Sumber: [Online]. Tersedia: http://e-pendidikan.com/terpilih20.html

Penggunaan teknologi secara *over* oleh anak-anak muda bahkan anak-anak dibawah umur yang senang bermain *games online* sampai lupa waktu, melihat, mendengar dan menirukan berbagai hal yang belum sepantasnya dilakukan, salah satu akibatnya adalah banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati masa kecilnya, masa keemasan perkembangan hidupnya secara sempurna. Hal tersebut akan menghambat lahirnya anak-anak muda penerus bangsa berkualitas yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Manusia bukan hanya hasil dari kekuatan global, tetapi kekuatan global itu sendiri merupakan hasil dari ciptaan manusia. Apabila manusia tidak mempunyai daya untuk dapat mengendalikan kekuatan global tersebut, maka pada akhirnya manusia akan menjadi tidak berdaya dari hasil pekerjaannya sendiri. Dalam hal ini pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, bukan hanya mengembangkan potens-potensi yang ada dalam diri manusia, tetapi juga mengontrol potensi yang telah dikembangkan tersebut agar bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa:

> "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

> serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Selanjutnya diuraikan pula tentang tujuan pendidikan nasional yaitu:

> "Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab".

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan sistem pendidikan dalam upaya pencapaian mutu pendidikan. Standar nasional pendidikan tersebut terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Pendidikan dasar merupakan tonggak pendidikan formal yang harus dilalui anak sebelum menginjak pendidikan selanjutnya, dan pada hakikatnya kemajuan pendidikan masa depan banyak bergantung pada pendidikan dasar. Sekolah merupakan satuan pendidikan yaitu sebagai lembaga pendidikan yang memiliki fungsi-fungsi mendasar dalam mengembangkan potensi dan kemampuan manusia. Gorton, 1976 (Sagala, 2010:71) mengemukakan bahwa "sekolah adalah suatu sistem organisasi, dimana terdapat sejumlah orang yang bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan sekolah,...". Selanjutnya Sagala juga mengemukakan bahwa sekolah sebagai suatu organisasi membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, dan dapat memberikan kontribusi yang kuat terhadap pembangunan bangsa.

Sekolah dasar merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang berfungsi untuk membekali kemampuan dasar

kepada anak didik juga memberikan dasar-dasar untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. Apabila dilihat dari penyelenggaraan sekolah dasar di Indonesia, terdapat dua jenis sekolah dasar, yaitu sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, telah diuraikan bahwa:

> "Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas: (a) pemerintah daerah yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (b) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (c) Kementerian yang menyelenggarakan satuan pendidikan tinggi; dan (d) masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi, melalui badan hukum yang berbentuk antara lain yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis."

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sekolah dasar negeri adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan sekolah dasar swasta adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dan diselenggarakan oleh masyarakat melalui badan hukum.

Tuntutan masyarakat untuk menguasai ilmu pengetahuan semakin kuat, mutu sekolah sebagai suatu keunggulan strategis telah bergeser menjadi suatu kebutuhan. Oleh karena itu, sebagai bentuk akuntabilitas publik, secara berkala pemerintah dan lembaga mandiri yang berwenang melakukan akreditasi sekolah yaitu kegiatan penilaian sekolah secara komprehensif. Dalam UU No. 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa: "Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah". Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dalam satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang

dan jenis pendidikan. Berdasarkan data hasil akreditasi BAN SM Provinsi Jawa Barat serta data hasil observasi di Dinas Pendidikan dan UPTD Kota Tasikmalaya, dapat diketahui bahwa di Kota Tasikmalaya terdapat 247 Sekolah Dasar Negeri yang tersebar di 10 kecamatan. Setiap sekolah memiliki status akreditasi yang berbeda-beda, yaitu 25 sekolah dasar berakreditas A, 221 sekolah dasar berakreditasi B, dan satu sekolah dasar berakreditasi C.

Sekolah dasar memiliki peranan yang sangat besar dalam mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu. Mutu telah menjadi suatu kenyataan dan fenomena dalam seluruh aspek dan dinamika masyarakat global. Dalam dunia pendidikan, faktor mutu menjadi sangat menentukan tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga pendidikan. Siswa, orang tua, dan masyarakat adalah pelanggan yang bebas menentukan pilihan yang tepat terhadap institusi mana yang layak memberikan jaminan terhadap masa depan anak-anaknya. Menurut Hoy C. et al. (Onisimus, 2011:141) mengemukakan bahwa: "Mutu pendidikan adalah sebuah evaluasi atas proses mendidik yang meningkatkan kebutuhan untuk mencapai proses pengembangan bakat pelanggan, dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh pelanggan..."

Persoalan mutu pendidikan menjadi isu yang terus mendapat perhatian publik. Keterpurukan yang dialami dunia pendidikan di Indonesia, mutlak menjadi keprihatinan bersama dan seharusnya tidak saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Beberapa informasi menarik dalam media massa *online* diantaranya penulis uraikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Berita dari Media Massa *Online*

Sumber	Isi
jurnas.com	...Muhammad Nuh mengungkapkan bahwa untuk saat ini angka putus sekolah tertinggi berada di Jawa Barat dengan jumlah 32 ribu anak usia sekolah. Muhammad

	Nuh menggambarkan pada 2007, dari 100 persen anak-anak yang masuk SD, yang melanjutkan sekolah hingga lulus hanya 80 persen, sedangkan 20 persen lainnya putus sekolah. Dari 80 persen yang lulus SD, hanya sekitar 61 persen yang melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya.
menkokesra.go.id	...Ribuan anak di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, tahun 2010 tercatat mengalami putus sekolah. Mereka tidak tamat SD atau SMP. Ada yang tidak mampu melanjutkan sekolah ke jenjang tingkat SMP maupun SMA sederajat.
Sumber	**Isi**
pikiran-rakyat.com	Nilai rata-rata Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar di Kota Tasikmalaya mengalami penurunan...Untuk nilai rata-rata UN 2012, Kota Tasikmalaya memperoleh nilai rata-rata 22,91. Nilai rata-rata tersebut lebih rendah dari perolehan nilai rata-rata untuk Kota Cirebon dengan nilai rata-rata 24.08, dan Kota Bekasi dengan nilai rata-rata 22.99. Nilai rata-rata untuk Kota Tasikmalaya dengan nilai rata-rata 22,91 tersebut juga menurun, dari perolehan nilai rata-rata 23,52 pada tahun 2011.

Jika mencermati berbagai probematika pendidikan nasional, khususnya mengenai mutu lulusan setiap satuan dan jenjang pendidikan, maka cenderung sulit menentukan *start* untuk memecahkan mata rantai permasalahan pendidikan. Lebih lanjut Onisimus (2011:151-152) memaparkan beberapa point penting dari berbagai sudut pandang, teori, dan gagasan, yang menjadi bahan refleksi bersama, diantaranya penulis gambarkan dalam tabel 1.2 yaitu:

Tabel 1.2 Rantai Permasalahan Pendidikan

No	Permasalahan Pendidikan
1	Dalam perspektif global, manajemen pendidikan nasional di Indonesia cenderung mengadopsi berbagai produk, sistem, metode, kurikulum, dan budaya bangsa lain yang belum tentu relevan dengan konteks budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pendidikan nasional semakin kehilangan identitas kebudayaan yang bertumpu pada Pancasila dan UUD 1945 dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. Nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan sebagai sesama anak bangsa mulai

	terkikis dan diganti dengan nilai-nilai individualistis.
2	Dalam konteks nasional maupun daerah, bidang pendidikan selalu dicemarkan dengan berbagai konflik dan kepentingan politik, sehingga pendidikan pada akhirnya tidak bebas nilai dan tidak independen karena dikelola sesuai hasrat dan keinginan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kekuasaan.
3	Mutu pendidikan secara nasional belum mampu bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia. Ironis memang, jika kenyataan yang dijumpai adalah lulusan sekolah sebagai tenaga kerja di luar negeri diperlakukan sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja kasar. Hal ini tidak sebanding dengan tenaga kerja yang diserap di dunia usaha dan industri. Perusahaan besar, baik dalam maupun luar negeri, masih merekrut tenaga ahli dari luar, sementara tenaga kerja berpendidikan dalam negeri hanya mampu bersaing pada level kedua dan ketiga.
No	**Permasalahan Pendidikan**
4	Pembangunan yang belum merata secara nasional, berdampak pada tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan sesuai kebutuhannya. Masih terjadi kesenjangan antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan dan hal tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan mutu pendidikan.
5	Ketersediaan anggaran pendidikan 20% APBN dan APBD sesuai ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, belum maksimal terdistribusi sesuai aspek pemerataan dan keseimbangan pada semua jenjang dan satuan pendidikan di sejumlah daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu diantaranya adalah melalui optimalisasi peran kepala sekolah sebagai pemimpin. Peningkatan mutu pendidikan pada dasarnya sangat ditentukan oleh operasionalisasi manajemen di tingkat sekolah, dan pemegang peran utama dalam menjalankan roda manajemen tersebut tiada lain terletak pada kepemimpinan kepala sekolah. Bill Crech, 1996 (Aan dan Cepi, 2008:30) menkonstruksi lima pilar untuk membangun mutu, yaitu: produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Dalam penjelasannya Crech menyatakan bahwa produk adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak mungkin ada tanpa mutu di dalam

proses. Mutu di dalam proses tidak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen yang kuat dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua pilar yang lain. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar lain dan jika salah satu lemah, dengan sendirinya yang lain pun lemah. Begitu juga dalam sistem persekolahan, lulusan merupakan titik pusat tujuan, lulusan berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu tidak mungkin ada tanpa organisasi persekolahan yang tepat. Untuk memajukan organisasi yang tepat diperlukan pemimpin yang memadai, dan pemimpin itu sendiri harus mendapat dukungan komitmen dari seluruh perangkat sekolah.

Kepala sekolah sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan program sekolah harus memiliki kompetensi dan keterampilan untuk memimpin. Mengacu pada Permendiknas No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah harus memiliki kompetensi: (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi manajerial, (3) kompetensi kewirausahaan, (4) kompetensi supervise, dan (5) kompetensi sosial. Kepala sekolah sebagai pemimpin juga harus mampu menggerakkan dan memberdayakan berbagai sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Terlebih sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, telah terjadi perubahan dalam sistem pengelolaan sekolah, yaitu adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat ke daerah, termasuk kewenangan dalam pengelolaan pendidikan.

Ibrahim Baffadal (2009:78) mengemukakan bahwa otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya otonomi daerah mutu pendidikan lebih berpeluang untuk ditumbuhkembangkan berdasarkan kebutuhan lokal, dan dalam hal tersebut sekolah juga ditantang untuk menjadi satuan pendidikan yang bermutu, agen pengembangan sumber daya manusia yang mampu

berpacu dalam membangun bangsa. Dalam hal ini, Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dengan potensi dan keterampilan yang dimilikinya harus mampu menggerakkan, mengarahkan, dan memberdayakan berbagai sumber daya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah.

Deming (Usman, 2010:511) mengemukakan bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan. Feigenbaum (Umiarso dan Imam Gojali, 2011:123) juga mencoba mendefinisikan bahwa mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Sallis (2011:52-54) mengemukakan bahwa mutu sebagai sebuah definisi yang absolut dan relatif. Mutu absolut merupakan bagian dari standar yang tinggi yang tidak dapat diungguli. Mutu yang relatif merupakan sesuatu yang ada dalam produk. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah produk memenuhi spesifikasi yang ada. Umiarso dan Imam Gojali (2011:125-126) mengemukakan "mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus...". Dalam bukunya "*Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*" Aan dan Cepi (2008: 8) mengemukakan bahwa mutu sekolah dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akdemik maupun prestasi bidang lain, serta lulusannya relevan dengan tujuan sekolah. Lebih lanjut Aan dan Cepi juga mengemukakan bahwa:

> "Mutu sekolah adalah mutu siswa yang mencerminkan kepuasan pelanggan, adanya partisipasi aktif manajemen dalam proses peningkatan mutu secara terus-menerus, pemahaman dari setiap orang terhadap tanggung jawab yang spesifik terhadap kualitas, setiap individu dalam sekolah dan *stakeholders* menyadari serta merealisasikan prinsip "mencegah terjadinya kerusakan", dan melaksanakan pandangan bahwa mutu adalah cara hidup (*way of life*)".

Selanjutnya Sagala (2010:169) mengemukakan bahwa mutu berkenaan dengan penilaian bagaimana suatu produk memenuhi kriteria, standar atau rujukan tertentu. Dalam dunia pendidikan, menurut Depdiknas (2001:2)

standar ini dapat dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran yang dapat diukur secara kuantitaf, juga pengamatan yang bersifat kualitatif. Rumusan mutu pendidikan bersifat dinamis dan dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. Mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga pengajaran, tetapi juga disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajua zaman. Bertitik tolak pada kecenderungan penilaian masyarakat tentang mutu lulusan, sekolah pun harus terus berkembang meningkatkan mutu lulusan dengan menyesuaikannya dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pendidikan secara internal maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Sekolah dapat dikatakan bermutu apabila prestasi sekolah khususnya prestasi siswa menunjukkan pencapaian yang tinggi.

Sallis (2011:67-69) mengemukakan bahwa tujuan mutu adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Lebih lanjut Sallis juga menjelaskan bahwa pelanggan pendidikan meliputi: (1) pelanggan eksternal pendidikan, yaitu: pelajar, orang tua, pihak yang memiliki kepentingan, dan pihak yang memiliki peran penting,; (2) pelanggan internal dalam pendidikan yaitu para guru dan staf, yang saling mendunkung dalam upaya meraih sebuah tujuan tunggal, yaitu memuaskan pelanggan. Selanjutnya dalam bukunya "*Educational Administration: Theory, Research, and Practice*" Hoy dan Miskel (2007:297-298) mengemukakan bahwa dari perspektif sekolah sebagai sistem sosial, efektivitas sekolah telah didefinisikan relatif terhadap pencapaian tujuan, hasil atau output sekolah meliputi:

> *"(1) for students: academic achievement, creativity, self-confidence, aspirations, expectations, and attendence, graduation and droupout rate; (2) for teacher: job satisfaction, absenteeism, and turn over; (3) for administrator: job satisfaction, balanced budgets, and commitment to school; (4) for society, perceptions of school effectivenees..."*

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa mutu sekolah adalah suatu keadaan dinamis yang merupakan derajat keunggulan sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan pendidikan, yang meliputi: (1) prestasi siswa yang juga merupakan prestasi sekolah; (2) kepuasan kerja guru dan personal sekolah; dan (3) kepuasan masyarakat, perspektif terhadap efektivitas sekolah (citra publik).

Dilihat dari definisi tersebut, maka mutu pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan terus berubah seiring dengan perubahan zaman yang melingkarinya, karena pendidikan merupakan buah dari zaman itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Perubahan zaman semakin cepat, perkembangan diberbagai bidang sangat pesat, dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu semakin tinggi. Penyelenggara sekolah dasar baik negeri maupun swasta terus berusaha memberikan pelayanan prima, meningkatkan mutu pendidikan, memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin komplek. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu memberikan bimbingan, tuntunan, pengarahan kepada seluruh komunitas sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan unsur utama dalam sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai pemimpin harus bertindak secara cepat dan tepat dalam menjawab berbagai tantangan global. Kepala sekolah sebagai pemimpin tentunya memiliki perilaku yang khas dalam memimpin, karena pada hakikatnya, perilaku manusia satu dan lainnya berbeda. Menurut Griffin dan Moorhead, (1996) perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh pengalaman pribadi masa lampau, sifat pribadi, dan latar belakang. Mintorogo, 1996 (Engkoswara dan Aan, 2011:180) menjelaskan bahwa perilaku kepemimpinan merupakan tindakan-tindakan spesifik seseorang

pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok. Dengan demikian perilaku kepemimpinan kepala sekolah adalah upaya seorang kepala sekolah dalam memainkan peran sebagai pemimpin guna mempengaruhi komunitas sekolah untuk mencapai tujuan. Seorang kepala sekolah yang baik harus mempunyai perilaku yang dapat mendorong, mengarahkan, dan memotivasi seluruh warga sekolah untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

Sudarwan Danim dan Suparno (2009:42) mengemukakan bahwa: Kajian di *Ohio State University* pada tahun 1950 memberi arah yang besar dalam pengembangan teori perilaku. Hasil studi kepemimpinan *Ohio State University* tersebut menunjukkan bahwa perilaku pemimpin pada dasarnya mengarah pada dua kategori, yaitu: (1) *initiating structure* yang mengacu pada perilaku pemimpin dalam menggambarkan hubungannya dengan kelompok kerja dalam membentuk pola organisasi, komunikasi dan prosedur yang ditetapkan dengan baik; dan (2) *consideration* yang mengacu pada sejauh mana pemimpin memiliki hubungan kerja yang dilandasi dengan saling percaya, menghargai, dan memperhatikan kepuasan bawahannya. Selanjutnya Hersey dan Blanchard, (S. Danim dan Suparno, 2009:41) mengemukakan bahwa: "*leadership is the process of directing and influencing the task related activities of an a group members*". Konsep ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin harus berusaha secara optimal menggerakkan bawahan agar dapat bekerja bersama secara produktif untuk mencapai tujuan.

Sri Minarti (2011:356) mengemukakan bahwa mutu sekolah tergantung kepada faktor kepemimpinan, terutama perilaku kepemimpinan. Selanjutnya Adman (2004:47) dalam hasil penelitiannya yang berjudul "Kepemimpinan dan Produktivitas" menunjukkan bahwa terdapat derajat keeratan hubungan yang positif antara perilaku kepemimpinan dengan produktivitas kerja karyawan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya indikator perilaku kepemimpinan yang terbentuk seperti kemampuan motivasi,

kemampuan dalam pengambilan keputusan yang merupakan bagian terpenting dalam menunjang produktivitas karyawan, dan hal tersebut merupakan kunci utama yang menjadi landasan dalam membentuk dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari hasil temuan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perilaku kepemipinan kepala sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **"Kontribusi Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Mutu Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Tasikmalaya"**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Identifikasi dan perumusan masalah berdasarkan Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI (2012:17) yaitu berisi rumusan masalah dan analisis masalah sekaligus identifikasi variabel-variabel penelitian beserta definisi operasionalnya. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya setelah didahului uraian tentang masalah penelitian, variabel-variabel yang diteliti, dan kaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Masalah pokok yang ingin diteliti pada penelitian ini adalah Kontribusi Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Mutu Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Tasikmalaya. Kontribusi dalam penelitian ini merupakan kekuatan yang bermanfaat atau daya dukung dari variabel X yaitu Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai variabel independen terhadap variabel Y yaitu Mutu Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Tasikmalaya sebagai variabel dependen.

Mintorogo, 1996 (Engkoswara dan Aan, 2011:180) menjelaskan bahwa perilaku kepemimpinan merupakan tindakan-tindakan spesifik seseorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok. Selanjutnya berdasarkan kajian studi kepemimpinan yang dipimpin oleh Fleishman dan rekan-rekannya di *Ohio State University* (S. Danim dan Suparno, 2009:42) menunjukkan bahwa perilaku pemimpin pada

dasarnya mengarah pada dua kategori, yaitu: *Initiating structure* dan *Consideration*. Dengan demikian perilaku kepemimpinan kepala sekolah merupakan upaya kepala sekolah dalam memainkan peran sebagai pemimpin yang dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu: (1) perilaku tugas yang merupakan upaya pemimpin dalam mengorganisasikan dan menetapkan peranan anggota kelompok, dan (2) perilaku hubungan yang merupakan upaya pemimpin dalam membina hubungan antara dirinya pribadi dengan anggotanya, guna mempengaruhi komunitas sekolah untuk mencapai tujuan.

Sedangkan mutu pendidikan menurut Hoy C. et al., (Onisimus Amtu, 2011:141): "Mutu pendidikan adalah sebuah evaluasi atas proses mendidik yang meningkatkan kebutuhan untuk mencapai proses pengembangan bakat pelanggan, dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh pelanggan...". Sagala (2010:169) mengemukakan bahwa: "Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pendidikan secara internal maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang diharapkan...". Sallis (2011:67-69) mengemukakan bahwa tujuan mutu adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Lebih lanjut Sallis juga menjelaskan bahwa pelanggan pendidikan meliputi: (1) pelanggan eksternal pendidikan, yaitu: pelajar, orang tua, pihak yang memiliki kepentingan, dan pihak yang memiliki peran penting,; (2) pelanggan internal dalam pendidikan yaitu para guru dan staf, yang saling mendunkung dalam upaya meraih sebuah tujuan tunggal, yaitu memuaskan pelanggan. Selanjutnya Hoy dan Miskel (2007:297-298) mengemukakan bahwa efektivitas sekolah telah didefinisikan relatif terhadap pencapaian tujuan, hasil atau output sekolah yaitu meliputi:

> *"(1) for students: academic achievement, creativity, self-confidence, aspirations, expectations, and attendence, graduation and droupout rate; (2) for teacher: job satisfaction, absenteeism, and turn over; (3) for administrator: job satisfaction, balanced budgets, and commitment to school; (4) for society, perceptions of school effectivenees..."*

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa mutu sekolah adalah suatu keadaan dinamis yang merupakan derajat keunggulan sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan pendidikan, yang meliputi: (1) prestasi siswa yang juga merupakan prestasi sekolah; (2) kepuasan kerja guru dan personal sekolah; serta (3) kepuasan masyarakat, perspektif terhadap efektivitas sekolah (citra publik), yang ditandai dengan loayalitas juga dukungan yang diberikan masyarakat terhadap sekolah, serta hubungan masyarakat dengan sekolah yang erat.

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana Mutu Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Tasikmalaya?
3. Berapa besar Kontribusi Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Mutu Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

   Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas dan menyeluruh serta mendapatkan informasi mengenai Kontribusi Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Mutu Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Tasikmalaya.

2. Tujuan Khusus
   a. Memperoleh gambaran mengenai Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Tasikmalaya.
   b. Memperoleh gambaran mengenai Mutu Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Tasikmalaya.

c. Memperoleh gambaran mengenai sebarapa besar Kontribusi Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Mutu Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperoleh manfaat, terutama yang berkaitan dengan Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Mutu Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Tasikmalaya, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya, mengembangkan dan meningkatkan kajian Ilmu Administrasi Pendidikan pada umumnya dan khususnya mengenai Kontribusi Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Mutu Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri.

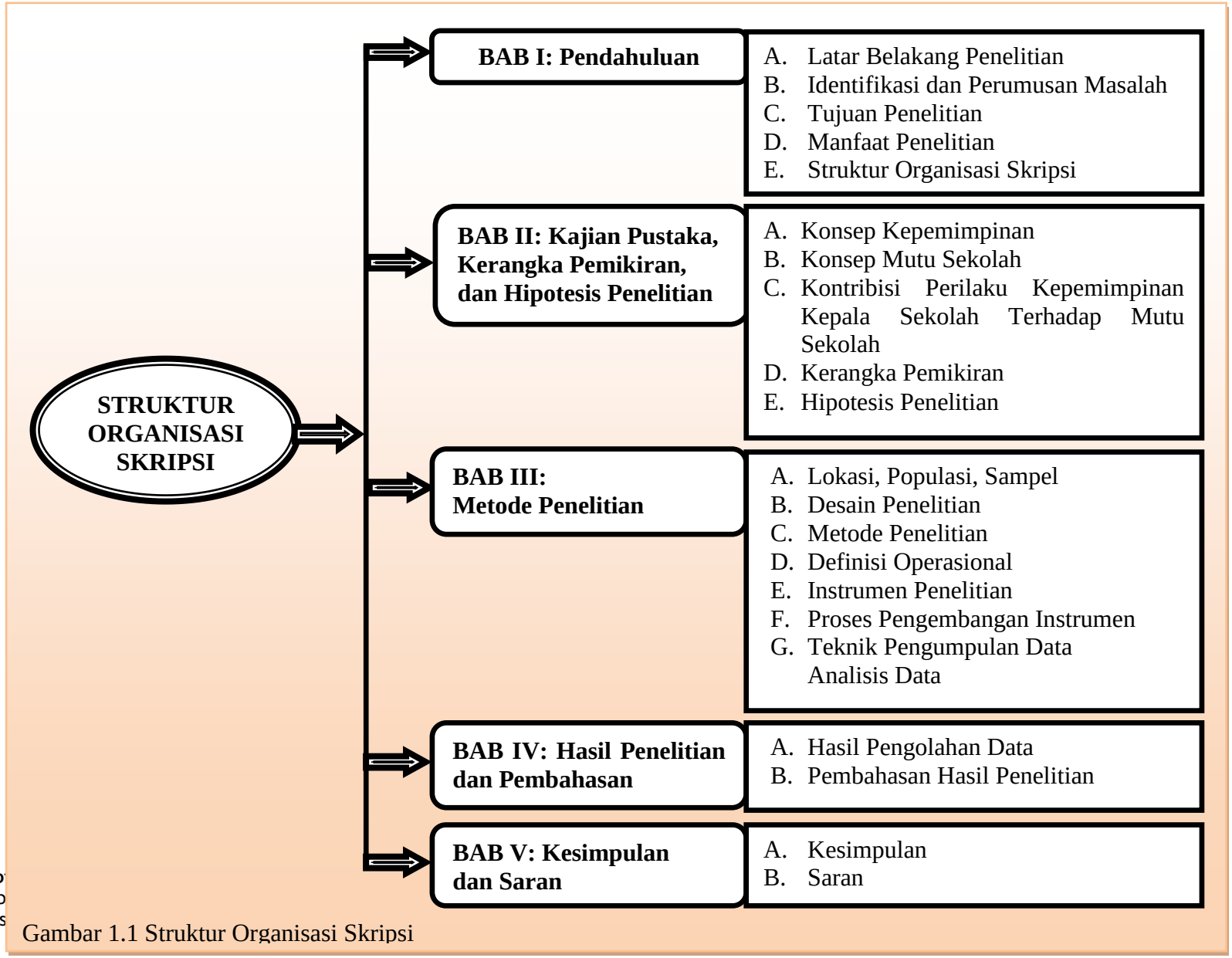
2. Secara Praktis

   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif kepada pihak sekolah mengenai pentingnya perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan kontribusinya terhadap mutu sekolah.

   b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya mengenai perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan kontribusinya terhadap mutu sekolah.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi berdasarkan Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI (2012:18) yaitu berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap BAB dan bagian BAB dalam skripsi, mulai dari BAB I hingga BAB terakhir. Dengan demikian struktur organisasi dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Skripsi

Rini Sofiani, 2013
Kontribusi Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Mutu Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Tasikmalaya
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

1. Bab I skripsi berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
2. Bab II skripsi berisi kajian pustaka yang menguraikan teori-teori/ konsep-konsep/ hukum-hukum/ model-model dan turunannya dalam bidang yang dikaji; penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, subjek, dan temuannya; serta posisi teoritik penelitian yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, yang diturunkan dalam subjudul "Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian".
3. Bab III skripsi berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, termasuk beberapa komponen berikut: lokasi, populasi, dan sampel; desain penelitian; metode penelitian; definisi operasional; instrumen penelitian; proses pengembangan instrumen; teknik pengumpulan data; dan analisis data, yang menguraikan secara terperinci tahap analisis data.
4. Bab IV skripsi berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya yang terdiri dari dua hal, yaitu: pengolahan/ analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, dan pembahasan atau analisis temuan, yang mendiskusikan temuan tersebut dikaitkan dengan dasar teoritik yang telah dibahas dalam bab kajian pustaka dan temuan sebelumnya.
5. Bab V skripsi merupakan bagian akhir dari skripsi, yang berisi tentang uraian kesimpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian.